

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada seluruh sektor kehidupan manusia. Pada negara berkembang termasuk Indonesia lebih memfokuskan melakukan pembangunan di sektor ekonomi dengan tujuan pembangunan tersebut dapat mendukung pencapaian tujuan atau mendorong perubahan-perubahan atau pembaharuan sektor lainnya. Keterbelakangan utama yang dihadapi oleh negara-negara yang sedang berkembang juga berada pada sektor ekonomi. Oleh sebab itu tidak mengherankan, bahkan dapat dikatakan merupakan tuntutan dan tujuan negara apabila pembangunan ekonomi mendapat perhatian khusus.

Menurut Irawan dan Suparmoko (2002), Pembangunan ekonomi adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang seringkali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil per kapita. Jadi tujuan pembangunan ekonomi disamping untuk menaikkan pendapatan nasional riil juga untuk meningkatkan produktivitas. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa tingkat output pada suatu saat tertentu ditentukan oleh tersedianya atau digunakannya baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, tingkat teknologi, keadaan pasar dan kerangka kehidupan ekonomi (sistem perekonomian) serta sikap dari output itu sendiri.

Sedangkan pembangunan ekonomi daerah menurut Arsyad (2001), adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber

daya yang ada membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sector swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru, serta merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, menuntut pemerintah daerah untuk melaksanakan desentralisasi dan memacu pertumbuhan ekonomi guna peningkatan kesejahteraan masyarakat dimana tujuan penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah.

Kedua Undang-Undang tersebut memiliki makna yang sangat penting bagi daerah, karena terjadinya pelimpahan kewenangan dan pembiayaan yang selama ini merupakan tanggung jawab pemerintah pusat. Kewenangan tersebut mencakup seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, agama serta moneter dan fiskal. Kewenangan pembiayaannya, yaitu daerah dapat menggali sekaligus menikmati sumber-sumber potensi ekonomi, serta sumber daya alamnya tanpa ada intervensi terlalu jauh dari pemerintah pusat. Hal ini akan berdampak terhadap perekonomian daerah yang pada akhirnya tercipta peningkatan pembangunan daerah.

Indikator keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, pemerataan keadilan dan keberlanjutan (Adisasmita, 2013).

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu perubahan tingkat ekonomi yang berlangsung dari tahun ke tahun. (Sukirno, 1994 dalam Kuncoro, 2003).

Terjadinya pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari peranan sektor-sektor yang ada dalam suatu perekonomian. Untuk melihat sektor-sektor yang memberikan peran utama bagi perkembangan perekonomian daerah. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap masalah ketimpangan dalam perkembangan dalam pembagian pendapatan adalah ketimpangan dalam perkembangan ekonomi antara berbagai daerah pada suatu wilayah yang akan menyebabkan pula ketimpangan tingkat pendapatan perkapita antara daerah.

Myrdal (1957) dalam Hidayati (2008) menunjukkan bahwa perbedaan tingkat kemajuan ekonomi antar daerah yang berlebihan dapat menyebabkan pengaruh yang merugikan terhadap perkembangan daerah secara keseluruhan. Ketimpangan pembangunan antar wilayah dapat dilihat dari perbedaan tingkat kesejahteraan dan perkembangan ekonomi antar wilayah.

Kecenderungan persebaran penguasaan PDRB dan laju pertumbuhan yang tidak sama akan menyebabkan semakin timpangnya pembangunan antar wilayah. Ketimpangan pembangunan antar wilayah juga ditandai dengan rendahnya aksesibilitas pelayanan sarana dan prasarana ekonomi dan sosial terutama masyarakat di perdesaan, wilayah terpencil, perbatasan serta wilayah tertinggal.

Ketimpangan antara kawasan perkotaan dan perdesaan ditunjukkan oleh rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat desa, tertinggalnya pembangunan kawasan perdesaan dibanding dengan perkotaan, dan tingginya ketergantungan kawasan perdesaan terhadap kawasan perkotaan.

Karakteristik fisik dan sosial wilayah di Indonesia yang beragam memberikan berbagai potensi wilayah berbeda. Perbedaan potensi wilayah di

Indonesia menyebabkan kesenjangan yaitu: kesenjangan antar wilayah, kesenjangan antar desa dan kota kesenjangan antara golongan pendapatan (Kuncoro, 2004).

Pendekatan makro yang meliputi penetapan sektor unggulan utama (*basic sector*) sebagai faktor pemicu utama pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB, penetapan sektor unggulan penunjang sebagai sektor yang berfungsi mendukung perkembangan dan keberlangsungan terhadap sektor unggulan utama, baik untuk jangka pendek, menengah maupun jangka panjang dan penetapan sektor pendukung (*non basic sector*) sebagai sektor yang berfungsi mendorong dan memperlancar sektor unggulan tersebut.

Untuk memacu laju pertumbuhan ekonomi regional serta meningkatkan kontribusinya terhadap pembentukan total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), maka pembangunan sektor unggulan dapat dijadikan sebagai penggerak pembangunan ekonomi. Secara umum tujuan pembangunan bidang ekonomi khususnya sektor unggulan adalah untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dengan demikian dapat tercipta stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis, dan tercipta kemakmuran dan kesejahteraan yang dinikmati oleh masyarakat daerah tersebut.

Suatu daerah akan mengalami percepatan pertumbuhan apabila memiliki sektor ekonomi yang mampu mengakselerasi pembangunan dan sektor – sektor yang lain (Rustiadi,2011). Potensi ekonomi yang ada disetiap daerah perlu digali dan dimanfaatkan secara efisien dan efektif untuk menunjang pembangunan maupun pertumbuhan ekonomi diwilayah tersebut. Pengembangan ekonomi

sektor unggulan yang memberikan kontribusi terbesar terhadap kemajuan ekonomi daerah merupakan prioritas kebijakan yang harus dilaksanakan. Untuk itu penentuan sektor ekonomi unggulan dalam pembangunan daerah adalah penting dilakukan sebagai upaya pengalokasian sumber daya yang tersedia dengan tepat.

Pertumbuhan sektor ekonomi unggulan di suatu daerah diyakini akan mendorong pertumbuhan dan perkembangan sektor-sektor ekonomi lain daerah setempat dan perekonomian daerah sekitar. Dalam hal ini daerah perkembangan sektor ekonomi unggulan akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan sumberdaya daerah sekitar dan bagi daerah pengembangan sektor ekonomi unggulan sendiri akan meningkatkan ekspor product dan jasa yang dihasilkan. Namun demikian pengembangan suatu daerah yang cepat akan menimbulkan kesenjangan pendapatan antar daerah bila tidak secara tepat diantisipasi

Sumatera Utara sebagai salah satu propinsi terbesar di Indonesia, memiliki luas sebesar 71.680,68 Km² yang terdiri dari 25 kabupaten dan 8 kota dengan batas daerah perairan dan laut serta dua provinsi lain: di sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Aceh, di sebelah Timur dengan negara Malaysia di Selat Malaka, di sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Riau dan Sumatera Barat, dan di sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia..

Kondisi perekonomian yang ditunjukkan oleh PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010 untuk seluruh kabupaten/ kota di Propinsi Sumatera Utara selama tahun 2011 – 2015 disajikan dalam Tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota Atas Dasar Harga Konstan 2010 (persen), Tahun 2011 - 2015

Kabupaten/Kota	2011	2012	2013	2014	2015*
1. N i a s	6,47	6,27	6,35	5,47	5,43
2. Mandailing Natal	6,47	6,27	6,37	6,52	6,22
3. Tapanuli Selatan	9,39	9,09	17,43	4,43	5,02
4. Tapanuli Tengah	5,28	5,11	5,18	5,04	5,08
5. Tapanuli Utara	5,06	4,90	5,27	5,11	4,81
6. Toba Samosir	5,25	5,08	4,85	4,23	4,55
7. Labuhanbatu	6,29	6,09	5,98	5,22	5,04
8. Asahan	5,69	5,51	5,71	5,89	5,57
9. Simalungun	6,26	6,06	5,25	5,33	5,24
10. D a i r i	5,19	5,03	5,05	5,03	5,04
11. K a r o	5,26	5,09	4,95	5,09	5,01
12. Deli Serdang	5,15	4,99	9,22	7,51	5,25
13. Langkat	6,66	6,45	5,61	5,12	5,03
14. Nias Selatan	5,35	5,18	4,65	4,32	4,46
15. Humbang Hasundutan	5,77	5,59	5,72	5,32	5,24
16. Pakpak Bharat	6,21	6,01	5,91	5,92	5,93
17. Samosir	6,25	6,05	6,10	5,95	5,77
18. Serdang Bedagai	6,29	6,09	5,80	5,12	5,05
19. Batu Bara	5,91	5,72	4,23	4,20	4,11
20. Padang Lawas Utara	6,59	6,38	6,15	6,08	5,94
21. Padang Lawas	6,41	6,21	6,14	5,97	5,74
22. Labuhanbatu Selatan	6,54	6,33	6,05	5,32	5,13
23. Labuhanbatu Utara	6,57	6,36	6,27	5,39	5,18
24. Nias Utara	6,41	6,21	6,34	5,56	5,49
25. Nias Barat	6,76	6,55	5,17	5,12	4,87
26. Sibolga	5,94	5,75	5,96	5,89	5,65
27. Tanjung Balai	6,42	6,22	5,94	5,78	5,58
28. Pematang Siantar	6,86	6,64	5,75	6,34	5,24
29. Tebing Tinggi	5,94	5,75	6,01	5,45	4,86
30. M e d a n	7,91	7,66	5,36	6,08	5,74
31. B i n j a i	6,26	6,06	6,07	5,83	5,40
32. Padangsidimpuan	6,09	5,90	5,80	5,17	5,04
33. Gunung Sitoli	6,38	6,18	6,22	6,10	5,39
Sumatera Utara	6,66	6,45	6,07	5,23	5,10

* Angka Sementara

Sumber : BPS, PDRB Kab/Kota Sumatera Utara Tahun 2012-2016

Tabel 1.1 diatas menunjukkan perkembangan perekonomian kabupaten/ kota di Sumatera Utara selama tahun 2011-2015 yang rata-rata cenderung melambat. Tercatat secara agregat pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara tahun 2011 sebesar 6,66 persen dan terus mengalami perlambatan pertumbuhan di tahun 2012 menjadi sebesar 6,45 persen, tahun 2013 menjadi sebesar 6,07 persen. Kondisi perekonomian yang cenderung tertekan akibat masih tergantungnya perekonomian daerah ke pemerintah pusat menjadi salah satu penyebab menurunnya pertumbuhan ekonomi selama 2 (dua) tahun kedepan, dimana pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara tahun 2014 sebesar 5,23 persen dan turun menjadi sebesar 5,10 persen di tahun 2015.

Dari data-data laju pertumbuhan ekonomi pada Tabel 1.1 tersebut juga dapat menjelaskan telah terjadinya ketimpangan dalam perekonomian di kabupaten/ kota propinsi Sumatera Utara. Ketimpangan yang makin tinggi antar wilayah ini dapat memunculkan masalah kecemburuan sosial, kerawanan disintegrasi wilayah dan disparitas ekonomi yang makin lebar dan tajam.

Disparitas ekonomi yang terjadi di kabupaten/ kota di propinsi Sumatera Utara khususnya disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya adalah sumber daya alam yang dimiliki daerah, sumber daya manusia, sarana fisik dan infrastruktur dalam mendukung pembangunan ekonomi itu sendiri serta pendapatan daerah sebagai modal dasar pembangunan serta indikator lainnya.

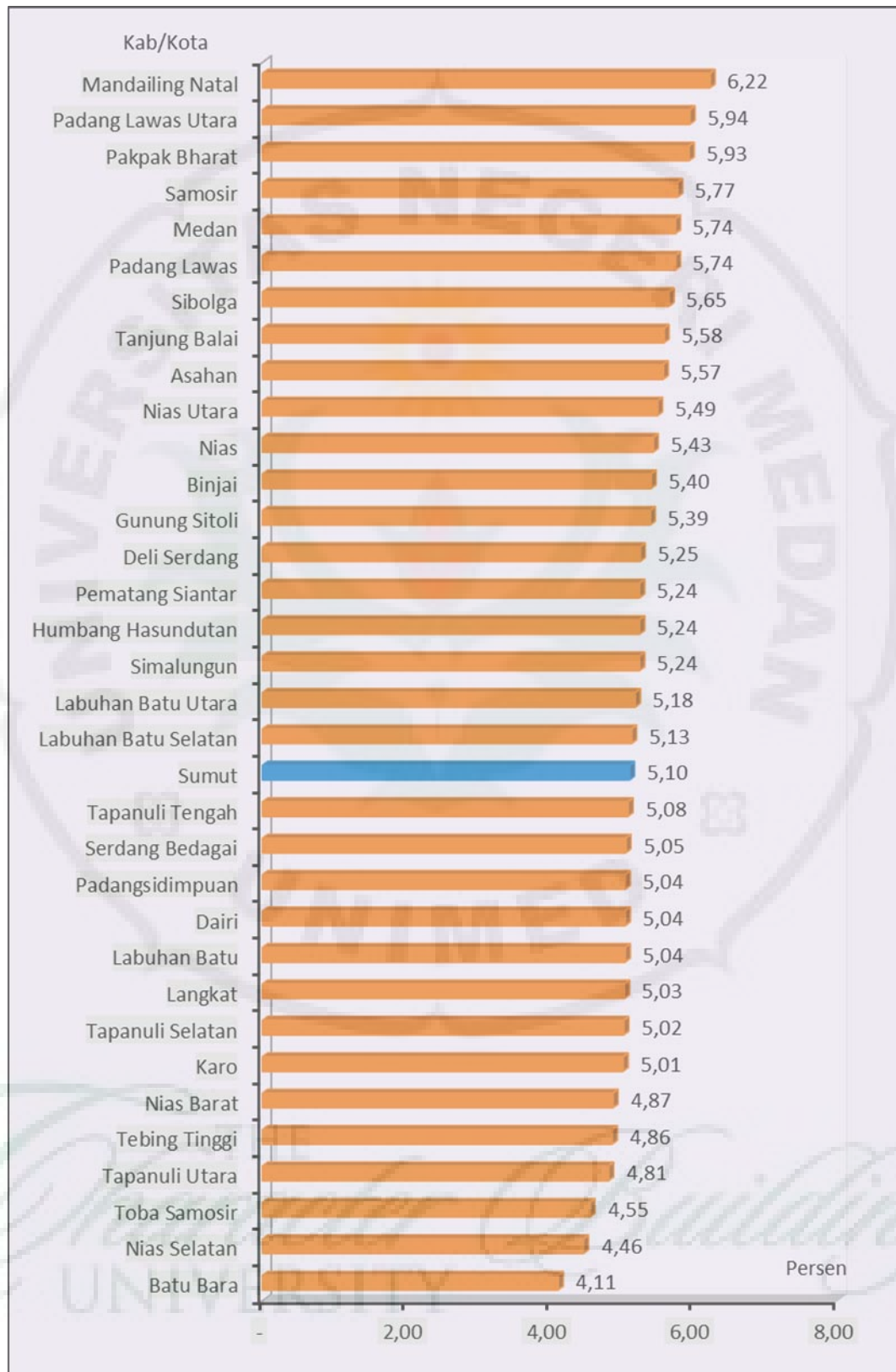
Ketimpangan pembangunan pada prinsipnya merupakan ketimpangan ekonomi yang mengandung makna kemiskinan dan kesenjangan. Agar ketimpangan dan perkembangan antar suatu daerah dengan daerah lain tidak menciptakan jurang yang semakin lebar, maka implikasi kebijaksanaan terhadap

daur perkembangan dari pembangunan haruslah dirumuskan secara tepat (Suryana, 2000).

Ketimpangan dan pemerataan sebenarnya telah dikenal cukup lama di Indonesia, misalnya program yang melatarbelakangi program padat karya, berbagai pembangunan infrastruktur, seperti dalam program perbaikan kampung yaitu perbaikan jalan, pos kamling, pembangunan irigasi dan lain-lain. Berbagai program jaring pengaman sosial seperti pembangunan jaringan infrastruktur di pedesaan, yang meliputi jalan, irigasi, listrik, telepon, pelayanan kesehatan dan pendidikan.

Hasil studi Easterly (1999) dalam Arsyad (2001) mengungkapkan bahwa tingkat ketimpangan (*disparities*) yang tinggi merupakan penghambat dari kemakmuran, tumbuhnya institusi yang berkualitas, dan berkembangnya pendidikan yang bermutu tinggi.

Dalam lingkup negara, ketimpangan secara spasial tidak selalu merata. Kesenjangan antar daerah seringkali menjadi permasalahan serius. Beberapa daerah mencapai pertumbuhan cepat, sementara beberapa daerah lain mengalami pertumbuhan yang lambat. Daerah-daerah tersebut tidak mengalami kemajuan yang sama disebabkan oleh karena kurangnya sumber-sumber yang dimiliki; adanya kecenderungan peranan modal (investor) memilih daerah perkotaan atau daerah yang telah memiliki fasilitas seperti prasarana perhubungan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, perbankan, asuransi, juga tenaga kerja yang terampil; di samping itu adanya ketimpangan redistribusi pembagian pendapatan dari Pemerintah Pusat kepada daerah.



Sumber : BPS Prop. Sumatera Utara Tahun 2016

Gambar 1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/ Kota Propinsi Sumatera Utara Tahun 2015 (Persen)

Gambar 1.1 menunjukkan ketimpangan pembangunan ekonomi yang diukur dari laju pertumbuhan ekonomi masing-masing kabupaten/ kota di provinsi Sumatera Utara selama tahun 2015, dimana kabupaten/ kota yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi dibawah laju pertumbuhan ekonomi provinsi Sumatera Utara, yaitu sebesar 5,10 persen sebanyak 14 kabupaten/ kota dengan kabupaten Batubara yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi terendah, yaitu sebesar 4,11 persen.

Sementara itu, kabupaten/ kota yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi diatas laju pertumbuhan ekonomi provinsi Sumatera Utara sebanyak 19 kabupaten/ kota dengan kabupaten Mandailing Natal yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi tertinggi, yaitu sebesar 6,22 persen selama tahun 2015.

Sejak tahun 2014, BPS telah menggunakan metodologi penghitungan PDB/ PDRB dalam konsep yang baru, yaitu penggunaan tahun dasar 2010 yang semula tahun dasar 2000. Dalam penelitian ini sektor lapangan usaha menggunakan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010, dimana sektor lapangan usaha yang tercakup dalam PDRB menggunakan 21 (Dua puluh satu) kategori di mulai dari kategori A hingga kategori U.

Kategori tersebut meliputi, (A) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; (B) Pertambangan dan Penggalan; (C) Industri Pengolahan; (D) Pengadaan Listrik dan Gas; (E) Pengadaan Air Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang; (F) Konstruksi; (G) Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; (H) Transportasi dan Pergudangan; (I) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; (J) Informasi dan Komunikasi; (K) Jasa Keuangan dan Asuransi; (L) Real Estate; (M,N) Jasa Perusahaan; (O) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan

Jaminan Sosial; (P) Jasa Pendidikan; (Q) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan (R,S,T,U) Jasa Lainnya

Seluruh kategori tersebut merupakan agregat seluruh sektor ekonomi yang merupakan gambaran perekonomian dari suatu daerah atau wilayah. Sektor-sektor lapangan usaha ini memberikan kontribusi yang berbeda terhadap PDRB, hal ini disebabkan kondisi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang juga memiliki karakteristik yang berbeda. Sehingga dengan demikian setiap daerah atau wilayah kabupaten/ kota memiliki spesifikasi dan keunggulan sektor yang berbeda.

Keunggulan sektor yang berbeda ini sebagai salah satu sumber ketimpangan regional yang terjadi antara kabupaten/ kota di Sumatera Utara. Semakin besar sumber daya alam dan sumber daya lainnya akan membuat daerah tersebut semakin maju sebaliknya daerah yang terbatas sumber daya alam dan sumber daya lainnya akan semakin tertinggal. Perbedaan inilah yang akan menimbulkan ketimpangan antar daerah semakin nyata.

Kondisi ketimpangan yang semakin lebar akan memicu berbagai masalah dan kesenjangan sosial, diantaranya adalah melambatnya perekonomian daerah, timbulnya masalah urbanisasi, pengangguran dan masalah sosial lainnya. Jika hal ini tidak segera diambil kebijakan oleh pemerintah khususnya pemerintah daerah akan menimbulkan kegagalan dalam pembangunan daerah itu sendiri.

Salah satu indikator dalam menentukan keunggulan daerah dilihat dari struktur perekonomian daerah, yaitu sektor-sektor perekonomian dalam lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan yang terus meningkat. Struktur perekonomian Propinsi Sumatera Utara disajikan dalam Tabel 1.2 selama tahun 2011 – 2015.

Tabel 1.2. Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Sumatera Utara Tahun 2011 – 2015 (persen)

Lapangan Usaha		2011	2012	2013	2014	2015
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5,88	5,31	4,71	4,39	5,60
B	Pertambangan dan Penggalian	10,72	11,95	26,03	5,14	6,40
C	Industri Pengolahan	3,22	5,64	4,84	2,97	3,52
D	Pengadaan Listrik dan Gas	13,87	(3,03)	(3,98)	3,21	(1,30)
E	Pengadaan Air Pengelolaan Sampah Limbah & Daur Ulang	6,30	5,13	5,68	6,04	6,44
F	Konstruksi	8,46	6,67	7,66	6,79	5,52
G	Perdagangan Besar & Eceran & Reparasi Mobil & Sp Motor	7,13	7,91	5,57	6,94	4,36
H	Transportasi dan Pergudangan	10,24	8,25	7,41	5,71	5,49
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,52	6,75	7,81	6,48	6,95
J	Informasi dan Komunikasi	9,96	8,79	7,78	7,23	7,11
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	8,71	10,09	9,59	2,62	7,17
L	Real Estate	9,66	6,96	6,94	6,59	5,76
M,N	Jasa Perusahaan	10,68	6,04	6,68	6,76	5,86
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	8,93	2,53	3,34	6,92	5,83
P	Jasa Pendidikan	4,79	4,94	8,34	6,37	5,03
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	16,00	10,58	10,82	7,00	6,93
R,S, T,U	Jasa Lainnya	9,00	7,83	7,45	7,04	6,69

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Tabel 1.2. menunjukkan perkembangan laju pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha, dimana di tahun 2011 sektor dengan laju pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah sektor transportasi dan komunikasi dengan pertumbuhan sebesar 7,56 persen, disusul oleh sektor jasa-jasa sebesar 6,62 persen dan sektor konstruksi/ bangunan sebesar 6,54 persen. Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi terendah adalah sektor pertambangan & penggalian sebesar 1,43 persen disusul oleh sektor industri pengolahan sebesar 2,76 persen dan sektor pertanian sebesar 4,85 persen.

Tahun 2010, sektor keuangan, real estate dan jasa perusahaan dengan laju pertumbuhan sebesar 10,78 persen merupakan sektor dengan laju pertumbuhan tertinggi selama tahun 2010, disusul oleh sektor transportasi dan keuangan sebesar 9,44 persen dan sektor listrik, air minum dan gas sebesar 6,88 persen. Lapangan usaha dengan laju pertumbuhan terendah adalah sektor industri pengolahan dengan laju pertumbuhan sebesar 4,16 persen, disusul oleh sektor pertanian sebesar 5,70 persen dan sektor pertambangan dan penggalian sebesar 5,87 persen.

Tahun 2011 hingga tahun 2013 sektor keuangan, real estate dan jasa perusahaan masih mendominasi, dengan laju pertumbuhan tertinggi masing-masing sebesar 13,61 persen di tahun 2011, sebesar 11,20 persen di tahun 2012 dan sebesar 8,31 persen di tahun 2013. Sedangkan laju pertumbuhan terendah selama tahun 2011 adalah sektor industri pengolahan sebesar 2,05 persen, tahun 2012 sektor pertambangan dan penggalian dengan laju pertumbuhan sebesar 2,04 persen dan di tahun 2013 sektor listrik, air minum dan gas dengan laju pertumbuhan sebesar 3,95 persen.

Dari seluruh sektor ekonomi di propinsi Sumatera Utara, tercatat di tahun 2012 laju pertumbuhan ekonomi tertinggi di sektor keuangan, real estate dan jasa perusahaan, disusul oleh sektor perdagangan, perhotelan dan restoran serta sektor transportasi dan keuangan. Ketiga sektor terbesar tersebut secara agregat merupakan sektor yang memiliki laju pertumbuhan tertinggi pada PDRB propinsi Sumatera Utara, namun demikian masih perlu dilakukan penelitian apakah sektor-sektor tersebut merupakan sektor unggulan atau sektor basis di propinsi Sumatera Utara. Demikian pula halnya pergeseran sektor dan keterkaitan antar sektor yang terjadi tidak dapat dipastikan dengan hanya melihat angka-angka yang tercatat dalam Tabel 1.2.

Dengan latar belakang tersebut penelitian ini dilakukan untuk menentukan sektor unggulan atau sektor basis, untuk melihat keterkaitan antar sektor ekonomi di propinsi Sumatera Utara, serta untuk melihat disparitas perekonomian antara kabupaten/ kota di Sumatera Utara. Oleh sebab itu, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Disparitas dan Identifikasi Sektor Unggulan, Perubahan dan Pergeseran Sektoral Dalam Perekonomian Sumatera Utara”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana ketimpangan pembangunan ekonomi antara kabupaten/ kota di Propinsi Sumatera Utara?
2. Sector-sektor apakah yang menjadi sektor basis dan non basis dalam perekonomian Propinsi Sumatera Utara?

3. Bagaimana perubahan dan pergeseran sektor perekonomian Propinsi Sumatera Utara?
4. Bagaimana kausalitas antar sektor dalam perekonomian terhadap sektor basis dalam perekonomian di Propinsi Sumatera Utara?

1.3. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan diatas, maka ditetapkan tujuan penelitian, yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis ketimpangan pembangunan ekonomi antara kabupaten/ kota di Propinsi Sumatera Utara
2. Untuk mengetahui dan menganalisis sektor-sektor apakah yang menjadi sektor basis dan non basis dalam perekonomian Propinsi Sumatera Utara
3. Untuk mengetahui dan menganalisis perubahan dan pergeseran sektor perekonomian Propinsi Sumatera Utara.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis kausalitas antar sektor dalam perekonomian di Propinsi Sumatera Utara

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk :

1. Sebagai bahan informasi dan pertimbangan untuk perencanaan pembangunan ekonomi Sumatera Utara.
2. Sebagai bahan referensi bagi peneliti yang terkait dengan pembangunan dan perencanaan ekonomi daerah.
3. Sebagai tambahan wawasan bagi penulis untuk mengetahui bagaimana ketimpangan pembangunan ekonomi di kabupaten/ kota di Propinsi Sumatera Utara.